

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

**Ervina
160710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Ervina
160710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ervina

NPM : 160710020

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
WANITA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai demham peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 11 Maret 2020



Ervina

160710020

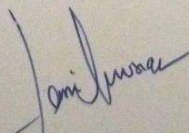
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Ervina
160710020

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 11 Maret 2020


Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing

ABSTRAK

Indonesia sudah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi, bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? dan apakah perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sudah memenuhi tujuan hukum? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan UU PPMI hak-hak tenaga kerja wanita yang harus mendapat perlindungan tidak diatur secara jelas dan eksplisit, akan tetapi justru perlindungan terhadap pekerja wanita dapat kita jumpai dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan. Penerapan UU PPMI, diharapkan dapat memberikan perlindungan secara keseluruhan bagi pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja melalui layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu hal yang penting bagi suatu negara terutama yang akan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk membuat Perjanjian Bilateral dengan Negara dimana warga negaranya banyak yang bekerja sebagai pekerja migran. Perlu adanya pengaturan PerUndang-Undangan yang lebih rinci dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di negara asing. Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap pekerja migran wanita dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara Tujuan Pekerja Migran.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Perjanjian Bilateral.

ABSTRACT

Indonesia has enacted and enacted Law No. 18 of 2017 on Indonesian Migrant Workers Protection, as a form of government commitment to improve the quality of protection for Indonesian migrant workers. Research conducted in this study includes. How to protect Indonesian women workers based on Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers? And whether the protection of Indonesian women workers under Law No. 18 of 2017 meets the legal objectives? As well as using the Normative Law Research Method Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Workers. In the provisions of the PPMI Act the rights of women workers who need protection are not explicitly and explicitly defined, however, the protection of women workers can be found in the provisions of the Employment Law. The implementation of the PPMI Act, is expected to provide overall protection to migrant workers, both before and during work, and after working through the integrated services of one roof and Indonesian migrant workers' protection work carried out by the Central Government and the Local Government. It is important for a country, especially for Indonesia to migrate workers, to make bilateral agreements with countries where many of them are migrants. There is a need for more detailed legislation to provide legal protection to women's workforce in foreign countries. There is a need to strengthen the protection of female migrant workers in the Bilateral Agreement between Indonesia and the Migrant Worker Country.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Bilateral Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik Penulis dari semester Awal hingga Semester Akhir yang selalu memberi semangat sampai mengingatkan harus bisa menyelesaikan Skripsi ini;
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.

6. Kedua orang tua penulis bapak Liu Chin Fan dan Ibu Bong Thu Ha yang selalu membantu dan memberi dukungan tanpa henti kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat terbaik Liu Wei Sen yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu ada dalam suka maupun duka menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi
8. Gusni Irawati, Nadia Sendo, dan Juliana serta teman - teman seperjuangan yang begitu baik memberikan bantuan setiap ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 11 Maret 2020

Ervina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	19
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	19
2.1.2 Analisis Yuridis	20
2.1.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	22
2.1.4 Hukum Ketenagakerjaan	25
2.1.5 Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia di Luar Negeri.....	33
2.1.6 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW)	37
2.2 Kerangka Yuridis	42
2.2.1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	42
2.2.2 Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	44
2.2.3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	47
2.3 Penelitian Terdahulu	49
2.4 Kerangka Pemikiran.....	61

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	62
3.1.1 Jenis Penelitian Normatif	62
3.1.2 Sifat Penelitian	64
3.2 Metode Pengumpulan Data	64
3.2.1 Sumber Data	64
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	65
3.3 Metode Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	69
4.1.1 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	69
4.1.2 Pemenuhan Tujuan Perlindungan Hukum Atas Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	76
4.2 Pembahasan	87
4.2.1 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	87
4.2.2 Pemenuhan Tujuan Perlindungan Hukum Atas Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 2: Riwayat Hidup	